

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRAC	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Kerangka Pemikiran	12
F. Metode Penelitian	24
1. Spesifikasi Penelitian	24
2. Metode Penelitian	24
3. Tahap Penelitian	25
4. Teknik Pengumpul Data	27
5. Alat Pengumpul Data	28
6. Analisis Data	29

7. Lokasi Penelitian.....	29
8. Jadwal Penelitian	30
BAB II TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	32
1. Pengertian Tindak Pidana.....	32
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	34
B. Kajian Tentang Pembalakan Liar	37
1. Pengertian Pembalakan Liar.....	37
2. Tindak Pidana Pembalakan Liar.....	38
C. Kajian Tentang Hutan.....	40
1. Pengertian Hutan	40
2. Fungsi dan Jenis Hutan.....	42
3. Perlindungan Terhadap Hutan.....	46
4. Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup	47
5. Hukum Kehutanan.....	50
BAB III PEMBALAKAN LIAR DI KAWASAN HUTAN LINDUNG	
KABUPATEN PANGANDARAN	
A. Kondisi Umum Kabupaten Pangandaran	52
1. Sejarah Singkat Kabupaten Pangandaran.....	52
2. Kondisi Geografis kabupaten pangandaran.....	53
3. Kondisi Topografi dan Iklim Kabupaten Pangandaran	54

4. Kondisi Hidrologi Kabupaten Pangandaran	54
5. Kependudukan Kabupaten Pangandaran	55
6. Kehidupan Masyarakat Kabupaten Pangandaran	55
B. Kondisi Umum Hutan Lindung Kabupaten Pangandaran	57
C. Kronologi Kasus Pembalakan Liar di Kabupaten Pangandaran.....	61
D. Data Tindak Pidana Pembalakan Liar di Kabupaten Pangandaran	62
BAB IV ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR DI KAWASAN HUTAN LINDUNG KABUPATEN PANGANDARAN	
A. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembalakan Liar di Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Pangandaran.....	65
B. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelanggar Tindak Pidana Pembalakan Liar di Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Pangandaran	70
C. Upaya Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Pembalakan Liar di kawasan Hutan Lindung Kabupaten Pangandaran	77
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	x
LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia (Dalam Era Otonomi Daerah)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sector Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Alam Setia Zein, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

_____, *Hukum Lingkungan Kidah-kaidan Pengelolaan Hutan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995.

Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.

A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.

Made Darma Weda, *Kriminologi*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Nurdjana, Teguh, dan Sukardi, *KORUPSI & ILLEGAL LOGGING dalam System Desentralisasi*, Pustakan Pelajar, Yogyakarta, 2005.

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Rony Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Salim H.S, *Dasar-dasar Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Sukardi, *ILLEGAL LOGGING dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Yogyakarta, 2005.

Supriadi, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

B. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ke-IV, oleh Yasir Arafat, Permata Press.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, Citra Umbara, Bandung, 2014.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013 tentang *perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*, Citra Umbara, 2014.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*, Citra Umbara, Bandung, 2014.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang *Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan*

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang *Perlindungan Hutan*.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2005 Tanggal 13 Juli 2005
Tentang *Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
126/KPTS-II/2003 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan.*

*Kitab Undang-undang Hukum Pidana & Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana*, diterjemahkan oleh Andi Hamzah, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.

C. Sumber Lain

Mohamad Ilham Pratama, *Gunung Peuteung Gundul Akibat Pembalakan Liar*,
,(<http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2014/09/11/296483/gunung-peteung-gundul-akibat-pembalakan-liar>).

A.Syalaby Ichsan, *Kasus Pembalakan Liar Riau Rugikan Negara Rp 1.900 Triliun*,
(<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/12/28/myiax2-kasus-pembalakan-liar-riau-rugikan-negara-rp-1900-triliun>).

Kantor Berita Politik RMOL, *41 Juta Hektar Hutan Nasional Rusak Akibat
Pembalakan Liar*, (<http://www.rmol.co/read/2012/11/24/86712/41-Juta-Hektar-Hutan-Nasional-Rusak-Akibat-Pembalakan-Liar>).

Ardiansyah, *Hukum Dalam Pandangan Max Weber*,
(<https://customslawyer.wordpress.com/2014/06/21/hukum-dalam-pandangan-max-weber/>).

Kabupaten Pangandaran, <http://taandika.blogspot.co.id/2014/12/kabupaten-pangandaran.html>

Ikin Salikin Iskandar, Sejarah pembentukan kabupaten pangandaran,
<http://cimerakpangandaran.blogspot.co.id/2011/11/sejarah-pemebentukan-kabupaten.html>

Profil Pangandaran, <http://www.pangandarankab.go.id/profil-pangandaran/>

Lima Dampak Penebangan Hutan Secara Liar Terhadap Lingkungan,
<http://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/hutan/dampak-penebangan-hutan-secara-liar>